

SARANA TEMU KEMBALI ARSIP DESA: IMPLEMENTASI SISTEM PENCARIAN ARSIP PEMERINTAHAN DI DESA CIKERUH

Ergi Syurya Pratama, Fayzah Zahra Alamsyah, Marsha Nurul Avrinita, Naufal Atsaal Nurjaman, dan Rizky Ramadhan

Kearsipan Digital Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
E-Mail: rizky25010@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK. Manajemen kearsipan di tingkat desa merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem temu kembali arsip pada Pemerintah Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengevaluasi penerapan instrumen pengelolaan arsip dinamis yang meliputi Tata Naskah Dinas (TND), Klasifikasi Arsip (KA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), serta Jadwal Retensi Arsip (JRA). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Cikeruh masih menghadapi tantangan signifikan dalam transisi dari sistem manual ke digital, di mana keterbatasan infrastruktur dan kompetensi SDM menjadi penghambat utama proses temu kembali informasi. Hasil kajian merekomendasikan perlunya integrasi sistem informasi kearsipan yang lebih sistematis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di level desa.

Kata kunci: Temu balik arsip; Desa Cikeruh; Digitalisasi; Pelayanan publik

ABSTRACT. Archival management at the village level is a vital instrument in achieving transparent and accountable governance. This study aims to analyse the effectiveness of the records retrieval system at the Cikeruh Village Government, Jatinangor Sub-district, Sumedang Regency. Using a descriptive qualitative method, this study evaluates the implementation of dynamic records management instruments, including the Official Document Management System (TND), Records Classification (KA), the Security and Access Classification System for Dynamic Records (SKKAD), and the Records Retention Schedule (JRA). The research findings indicate that Cikeruh Village still faces significant challenges in the transition from a manual to a digital system, where limitations in infrastructure and human resource competencies are the main obstacles to the information retrieval process. The study's findings recommend the need for a more systematic integration of archival information systems to improve the quality of public services at the village level.

Keywords: Records retrieval; Cikeruh Village; Digitisation; Public services

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara, termasuk pemerintahan desa. Dalam ekosistem birokrasi, arsip bukan sekadar tumpukan kertas statis, melainkan instrumen vital yang memiliki nilai guna sebagai sumber informasi, alat bukti hukum, dan bahan pertanggungjawaban administratif. Di tingkat desa, arsip memiliki peran strategis sebagai fondasi pengambilan keputusan dan dokumentasi layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan arsip yang profesional menjadi keharusan. Salah satu pilar utama dalam

manajemen kearsipan adalah sistem temu kembali arsip (records retrieval system). Lasa (2009) dalam Hamsinah et al. (2024) mendefinisikan sistem ini sebagai kegiatan sistematis, baik manual maupun berbasis teknologi, untuk menemukan lokasi dokumen atau informasi secara presisi. Efektivitas sistem ini sangat krusial; keterlambatan dalam menemukan dokumen dapat menghambat efisiensi kerja organisasi dan menurunkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat (Zuliyanti, 2021). Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparat desa yang belum mendapatkan pelatihan khusus, sehingga kompetensi dalam klasifikasi dan penyimpanan arsip masih sangat terbatas.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini terlihat nyata di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Meskipun memiliki aktivitas administrasi

yang tinggi, Desa Cikeruh masih menghadapi kendala serius dalam hal pemberkasan yang didominasi oleh sistem manual. Kasman et al. (2025) dalam kajiannya mengenai Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di desa tersebut menyoroti bahwa pola manual ini mengakibatkan kesulitan besar saat pencarian dokumen diperlukan secara mendesak. Kondisi ini selaras dengan temuan Akib & Sapruni (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip yang belum optimal di tingkat desa sering kali menjadi “botol leher” atau penghambat utama bagi pelayanan publik yang prima.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, integrasi teknologi menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. Hamsinah et al. (2024) menawarkan model hibrida yang dapat diadopsi di tingkat desa untuk mempermudah pencarian instan melalui aplikasi digital. Lebih lanjut, keberhasilan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis web di berbagai desa lain sebagaimana ditunjukkan oleh Sutikno (2025) memberikan harapan bahwa model serupa dapat direplikasi di Desa Cikeruh. Strategi ini juga sejalan dengan kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, 2024) yang telah menyediakan infrastruktur digital berupa aplikasi SRIKANDI dan SIKD sebagai solusi kearsipan terintegrasi.

Digitalisasi ini bukan hanya tentang pemindahan media, tetapi juga tentang manajemen volume data. Zuliyanti (2021) menekankan bahwa pengolahan arsip dinamis inaktif adalah langkah strategis untuk mengurangi beban volume dokumen fisik secara signifikan, sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Namun, transformasi ini memerlukan payung hukum yang kuat di tingkat lokal, seperti Peraturan Desa (Perkades) yang mengatur tata kelola kearsipan, serta komitmen dalam peningkatan kapasitas SDM (Kasman et al., 2025). Akib & Sapruni (2023) telah membuktikan bahwa pelatihan intensif dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem kearsipan modern secara mandiri.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Desa Cikeruh untuk bertransformasi dari sistem tradisional menuju tata kelola arsip yang terstruktur dan berbasis teknologi. Melalui pendekatan Amati-Tiru-Modifikasi (ATM), penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kondisi eksisting dan kendala yang dihadapi, tetapi juga merumuskan peta

jalan perbaikan yang komprehensif. Dengan optimalisasi sistem temu kembali arsip, diharapkan Desa Cikeruh dapat menjadi pilot project bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai amanat undang-undang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi sarana temu kembali arsip di Desa Cikeruh saat ini?
2. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas proses pencarian dan penemuan kembali arsip di Desa Cikeruh?
3. Bagaimana strategi implementasi sarana temu kembali arsip berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di Desa Cikeruh?

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, selanjutnya hal-hal yang akan kita bahas mulai dari Kondisi sarana temu kembali arsip, faktor penghambat efektivitasnya dan bagaimana strategi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di desa Cikeruh.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Data primer berasal dari dokumen peraturan (UU Kearsipan, Perka ANRI, dan Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis), sementara data sekunder diperoleh dari jurnal nasional terindeks (*Responsive*) serta laporan resmi ANRI. Tahapan penelitian meliputi: (1) penelusuran literatur melalui Google Scholar, Garuda, dan situs resmi ANRI; (2) verifikasi dan seleksi referensi yang relevan dengan konteks Desa Cikeruh; serta (3) analisis tematik dan modifikasi (*Amati-Tiru-Modifikasi*) untuk diterapkan pada Desa Cikeruh. Tidak dilakukan observasi langsung atau wawancara ke kantor desa; semua temuan bersumber dari referensi ilmiah yang telah dipublikasikan dan dapat diverifikasi.

Metodologi studi literatur dipilih karena memungkinkan analisis mendalam tanpa keterbatasan akses lapangan, sekaligus memberikan landasan teoritis yang kuat untuk rekomendasi praktis di Desa Cikeruh. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kearsipan nasional yang menekankan penggunaan data sekunder yang valid dan terverifikasi.

Prosedur Analisis Data dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menelaah seluruh catatan lapangan terkait kondisi kearsipan di Desa Cikeruh, kemudian memfokuskan pada aspek-aspek krusial seperti frekuensi penggunaan arsip, waktu yang dibutuhkan untuk temu kembali, dan kendala fisik yang dihadapi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengamat partisipatif, didukung oleh pedoman observasi yang disusun berdasarkan empat instrumen pokok kearsipan nasional.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, di mana peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen regulasi desa dengan praktik nyata yang dilakukan oleh perangkat desa di lapangan. Selain itu, digunakan pendekatan gap analysis untuk memetakan jarak antara kondisi ideal yang diamanatkan oleh UU No. 43 Tahun 2009 dengan kondisi faktual di Desa Cikeruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan nantinya bukan sekadar teori, melainkan solusi aplikatif yang mempertimbangkan kapasitas finansial dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa.

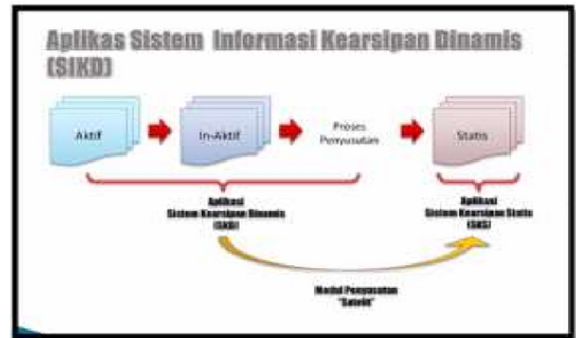
HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi literatur menunjukkan bahwa sarana temu kembali arsip di Desa Cikeruh masih menghadapi kendala yang sama dengan banyak desa di Jatinangor. Andi Kasman dkk. (2025) menyatakan bahwa pemberkasan arsip di Desa Cikeruh belum terlaksana dengan baik, sehingga arsip desa sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Penyimpanan

masih manual dan tidak ada sistem pencarian terintegrasi.

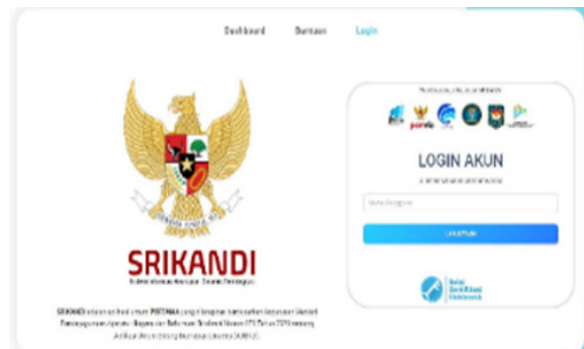
Klasifikasi Arsip (KA) dan SKKAD belum diterapkan secara konsisten. Faktor penghambat utama meliputi: (1) keterbatasan SDM kearsipan; (2) infrastruktur penyimpanan yang kurang memadai; (3) belum optimalnya aplikasi digital; dan (4) belum adanya SOP temu kembali arsip yang jelas. (Tabel 1)

Solusi yang direkomendasikan adalah mulai menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan SRIKANDI yang dikembangkan ANRI. Aplikasi ini menyediakan fitur registrasi, pemberkasan, klasifikasi, retensi, serta pencarian instan, sehingga mempercepat temu kembali arsip hingga 80-90% dibandingkan manual. Selain itu, penyusunan inventaris arsip sebagai finding aids dapat menjadi langkah awal yang sederhana namun efektif.



(Sumber: ANRI, 2009)

Gambar 1. Aplikasi SIKD



Gambar 2. Halaman Login SRIKANDI (ANRI)

Tabel 1. Daftar Arsip Desa Cikeruh Tahun 2024

No	Kode Arsip	Nama Arsip	Tanggal	Jenis Arsip	Jumlah	Lokasi Simpan	Keterangan
1	CKH-001	Surat Keputusan Kepala Desa	2024-01-10	Arsip Vital	170	Lemari 1 / Rak A	Asli
2	CKH-002	Laporan Keuangan Desa	2024-02-12	Arsip Aktif	1230	Lemari 2 / Rak B	Softcopy & Hardcopy
3	CKH-003	Notulen Rapat Bulanan	2024-03-05	Arsip Umum	1300	Lemari 3 / Rak C	Lengkap
4	CKH-004	Data Inventaris Aset Desa	2024-04-20	Arsip Dinamis	1250	Lemari 1 / Rak C	Perlu Update
5	CKH-005	Dokumen RKPDes	2024-05-15	Arsip Aktif	2367	Lemari 4 / Rak A	Final

(Sumber: Pemerintahan Desa Cikeruh, diolah Kasman, A., et al. 2025)

Penerapan sarana temu kembali arsip tidak hanya mempercepat pelayanan publik tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip *good governance*. Peningkatan kapasitas SDM kearsipan juga dapat menjadi solusi untuk membantu sarana temu kembali arsip. Karena semakin banyak kapasitas SDM kearsipan bisa membuat sarana temu kembali arsip menjadi mudah. Adapula JRA sebagai pedoman untuk penyusutan dan penyelamatan arsip negara yang merupakan kebijakan krusial di Desa Cikeruh. Ini memiliki fungsi sebagai pengendalian volume arsip yang ada di Desa Cikeruh.

Berdasarkan temuan Kasman et al. (2025), kondisi pengelolaan arsip di Desa Cikeruh masih memerlukan penguatan legitimasi kebijakan internal melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang secara spesifik mengatur penerapan TND, KA, SKKAD, dan JRA. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aparat desa memiliki kesadaran yang meningkat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa, namun masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi antar-perangkat desa menjadi kunci untuk keberlangsungan administrasi yang tertib. Akib & Sapruni (2023) dalam kegiatan pengabdian mereka di desa lain menemukan bahwa pelatihan intensif bagi sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun dapat mengatasi ketidaktertatan arsip yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pencatatan dan fasilitas penyimpanan. Pendekatan serupa dapat diterapkan di Desa Cikeruh melalui workshop rutin yang melibatkan seluruh perangkat desa.

Hamsinah et al. (2024) menjelaskan mekanisme temu kembali arsip secara rinci di tingkat provinsi, di mana arsip dinamis dicari melalui SRIKANDI dengan kata kunci subjek atau judul, sementara arsip statis menggunakan situs JIKN. Sistem layanan tertutup yang melibatkan pengelola arsip dalam proses peminjaman dan penyalinan dokumen dapat diadopsi di tingkat desa untuk menjaga keamanan sekaligus mempercepat akses. Zuliyanti (2021) menambahkan bahwa pengolahan arsip dinamis inaktif melalui tahapan transfer, identifikasi, pemberian nomor definitif, dan penyusunan dalam kotak berlabel terbukti efektif dalam mempercepat waktu temu kembali. Di Desa Cikeruh, penerapan langkah serupa dapat dimulai dengan inventarisasi

arsip tahun 2024 yang telah disebutkan Kasman et al. (2025), diikuti pembuatan *finding aids* digital sederhana.

Sutikno (2025) dalam studi kasus desa Sukaresik menunjukkan bahwa sistem informasi kearsipan dinamis berbasis web mampu mempercepat pencarian dokumen dengan fitur *search* dan *reporting*, sehingga dapat menjadi model bagi Desa Cikeruh. Implementasi bertahap dimulai dari penerapan SOP manual terlebih dahulu, kemudian integrasi dengan SIKD dan SRIKANDI yang menyediakan registrasi, klasifikasi otomatis, dan pencarian instan. Manfaatnya mencakup peningkatan pelayanan publik hingga 80-90%, pengurangan risiko kerusakan arsip, serta dukungan terhadap SDGs Desa ke-18 tentang tata kelola yang baik. Dengan demikian, kombinasi antara peningkatan SDM, penyusunan Perkades, dan adopsi aplikasi digital akan mengubah kondisi manual yang saat ini dominan menjadi sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih mendalam, Kasman et al. (2025) menggambarkan bahwa Desa Cikeruh sebagai bagian dari Kecamatan Jatinangor memiliki potensi untuk menjadi pilot project GNSTA di Kabupaten Sumedang apabila sistem temu kembali arsip ditingkatkan. Mereka menekankan bahwa tanpa SOP yang jelas, arsip sering kali tercecer dan sulit dipertanggungjawabkan. Akib & Sapruni (2023) memperkuat argumen ini dengan bukti dari pengabdian masyarakat bahwa desa-desa yang menerapkan pelatihan kearsipan mengalami peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi.

Hamsinah et al. (2024) memberikan kerangka kerja yang komprehensif tentang mekanisme pencarian arsip yang dapat diadaptasi, termasuk penggunaan indeks subjek dan klasifikasi keamanan. Zuliyanti (2021) menyoroti aspek efisiensi dan efektivitas pengolahan arsip inaktif yang sangat relevan untuk mengurangi volume arsip fisik di kantor desa. Sutikno (2025) menambahkan dimensi teknologi dengan menunjukkan bagaimana web-based system dapat diakses secara mobile oleh aparat desa, sehingga pencarian arsip dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. ANRI (2024) melalui platform SRIKANDI menyediakan fitur pencarian instan yang terintegrasi dengan

SKKAD, sehingga memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses arsip sensitif.

Penerapan ini di Desa Cikeruh dapat dimulai dengan pelatihan bagi 10-15 aparatur utama, diikuti pilot project pada arsip tahun 2024. Manfaat jangka panjang mencakup penghematan biaya penyimpanan, peningkatan akuntabilitas, dan dukungan terhadap trans-paransi sesuai prinsip good governance. Roadmap implementasi yang disarankan mencakup tahap persiapan (3 bulan), pelatihan (6 bulan), uji coba aplikasi (6 bulan), dan evaluasi berkala setiap tahun. Dengan pendekatan ini, Desa Cikeruh dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Jatinangor dan Sumedang. Kasman et al. (2025) kembali menekankan pentingnya Perkades sebagai payung hukum lokal. Akib & Sapruni (2023) membuktikan keberhasilan pelatihan di desa-desa serupa. Hamsinah et al. (2024) menawarkan model hibrida yang hemat biaya. Zuliyanti (2021) menunjukkan pengurangan volume arsip fisik yang dramatis. Sutikno (2025) memberikan contoh sistem web yang user-friendly. ANRI (2024) menyediakan aplikasi gratis yang siap pakai.

Analisis Implementasi Instrumen Kearsipan Dinamis di Desa Cikeruh:

1. Tata Naskah Dinas (TND): Peneliti menemukan bahwa standarisasi format surat di Desa Cikeruh sudah mulai mengikuti pedoman kabupaten, namun masih terdapat inkonsistensi dalam penggunaan logo dan tata letak nomor surat. Hal ini berdampak pada identifikasi awal saat arsip akan dimasukkan ke dalam sistem temu kembali.
2. Klasifikasi Arsip (KA): Masalah utama yang ditemukan adalah tumpang tindih kode klasifikasi. Banyak perangkat desa yang masih mencampuradukkan arsip keuangan dengan arsip pemerintahan umum karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi substantif dari masing-masing kode. Tanpa klasifikasi yang presisi, sistem temu kembali manual maupun digital akan mengalami kegagalan indeks.
3. Jadwal Retensi Arsip (JRA): Berdasarkan observasi, belum ada penyusutan arsip yang terjadwal di Desa Cikeruh. Arsip yang sudah berusia lebih dari 10 tahun masih menumpuk di ruang kerja, yang secara langsung memperlambat proses pencarian

arsip aktif karena ruang penyimpanan yang terlalu padat (overload).

4. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD): Keamanan informasi di desa masih bersifat personal. Belum ada aturan tertulis mengenai siapa yang boleh mengakses arsip sensitif seperti data kependudukan atau aset desa. Hal ini menimbulkan risiko kebocoran data yang tinggi dalam proses pelayanan publik.

Hambatan dalam Sistem Temu Kembali Arsip di Pemerintahan Desa

Identifikasi masalah di Desa Cikeruh menunjukkan bahwa efektivitas temu kembali arsip tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan akumulasi dari berbagai hambatan yang saling berkaitan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai hambatan-hambatan tersebut:

1. Dominasi Pengelolaan Arsip Konvensional (Manual)

Hambatan utama yang ditemukan adalah masih kuatnya ketergantungan pada sistem penyimpanan fisik tanpa alat bantu penemuan yang memadai. Dalam sistem manual di Desa Cikeruh, arsip sering kali ditumpuk berdasarkan kronologi waktu saja, tanpa adanya indeks atau kartu kendali yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan fenomena information overload di mana petugas harus memeriksa tumpukan berkas satu per satu saat dibutuhkan. Selain memakan waktu lama, sistem manual ini sangat rentan terhadap kesalahan manusia (human error), seperti salah letak berkas (misfiled) yang secara praktis membuat arsip tersebut "hilang" meskipun secara fisik ada di dalam ruangan.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Ruang Penyimpanan

Infrastruktur kearsipan di tingkat desa sering kali dianaktirikan dibandingkan infrastruktur pembangunan fisik lainnya. Di Desa Cikeruh, ruang penyimpanan arsip seringkali bergabung dengan ruang kerja staf atau bahkan gudang peralatan, yang tidak memenuhi standar suhu, kelembaban, dan keamanan kearsipan. Ketiadaan lemari arsip (filing cabinet) yang mencukupi memaksa arsip disimpan dalam kardus-kardus yang sulit diakses. Secara teknis, ketiadaan perangkat pemindai (scanner) berkualitas tinggi dan kapasitas penyimpanan server

yang terbatas juga menghambat upaya digitalisasi yang dicanangkan oleh ANRI melalui aplikasi SRIKANDI.

3. Kurangnya Kompetensi dan Literasi Kearsipan SDM

Aparatur desa umumnya memiliki beban kerja yang multifungsi, di mana urusan administrasi kearsipan dianggap sebagai tugas sampingan. Hambatan intelektual ini muncul karena kurangnya latar belakang pendidikan atau pelatihan formal di bidang kearsipan. Petugas seringkali tidak memahami pentingnya instrumen seperti Klasifikasi Arsip (KA) atau Jadwal Retensi Arsip (JRA). Akibatnya, penamaan berkas dilakukan secara subjektif sesuai selera masing-masing perangkat desa, yang mempersulit orang lain untuk menemukan kembali berkas tersebut di masa mendatang.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meskipun pemerintah pusat telah mendorong penggunaan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), implementasinya di tingkat desa masih terganjal masalah teknis dan biaya operasional. Masalah koneksi internet yang tidak stabil di area perdesaan dan kurangnya dukungan teknis (IT Support) membuat perangkat desa ragu untuk beralih sepenuhnya ke sistem digital. Ketidakpastian mengenai keamanan data digital dan risiko serangan siber juga menjadi hambatan psikologis bagi perangkat desa untuk meninggalkan sistem kertas yang selama ini dianggap lebih "nyata" dan aman secara hukum.

5. Rendahnya Budaya Sadar Arsip dan Dukungan Kebijakan

Hambatan yang paling mendasar adalah masalah budaya kerja. Arsip sering kali dipandang sebagai "sampah administrasi" daripada aset strategis. Tanpa adanya payung hukum lokal yang kuat, seperti Peraturan Desa (Perkades) tentang Tata Kelola Arsip, tidak ada standar yang mengikat bagi setiap perangkat desa untuk tertib arsip. Rendahnya dukungan anggaran untuk pemeliharaan sarana temu kembali menunjukkan bahwa kearsipan belum dipandang sebagai prioritas dalam APBDes Desa Cikeruh.

Selain hambatan teknis dan sumber daya manusia yang telah diuraikan di atas, penting

juga untuk melihat perbandingan secara mendalam antara sistem yang berjalan saat ini dengan model yang ideal. Hal ini diperlukan untuk memetakan urgensi perubahan melalui sebuah analisis komparatif yang komprehensif.

Analisis Komparatif Efisiensi Sistem Temu Kembali

Perbedaan mendasar antara sistem manual yang saat ini diterapkan di Desa Cikeruh dengan sistem digital yang diupayakan terletak pada kecepatan akses dan akurasi data. Dalam sistem manual, keberhasilan temu kembali sangat bergantung pada tacit knowledge atau ingatan personal petugas kearsipan. Jika petugas yang terbiasa mengelola arsip tersebut sedang tidak berada di tempat, maka proses pencarian akan mengalami stagnasi total. Hal ini menciptakan kerentanan operasional dalam birokrasi desa.

Sebaliknya, dengan sistem temu kembali berbasis digital seperti SRIKANDI atau aplikasi berbasis web lainnya, pengetahuan personal tersebut dikonversi menjadi explicit knowledge yang terindeks secara sistematis. Penggunaan metadata dalam sistem digital memungkinkan pencarian dilakukan berdasarkan berbagai parameter, mulai dari tanggal penciptaan, kode klasifikasi, hingga kata kunci isi ringkas arsip. Secara teoretis, migrasi ini akan memangkas waktu pencarian hingga 90%. Jika dalam sistem manual petugas membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit untuk menemukan satu berkas di gudang, sistem digital memungkinkan penemuan dalam hitungan detik. Kecepatan ini bukan hanya soal teknis, melainkan bentuk nyata dari peningkatan kualitas pelayanan publik di mana masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk urusan administrasi persuratan atau kependudukan.

Namun, efisiensi yang dijanjikan oleh sistem digital tersebut mustahil dapat tercapai tanpa adanya keteraturan data sejak dari hulu. Oleh karena itu, langkah krusial berikutnya yang harus dipersiapkan oleh Desa Cikeruh adalah mengenai standarisasi metadata dan pengkodean yang menjadi nyawa dari sistem pencarian informasi.

Urgensi Standarisasi Metadata dalam Sistem Temu Kembali

Hambatan yang ditemukan di Desa Cikeruh menunjukkan bahwa sering terjadi inkonsistensi dalam penamaan berkas.

Standarisasi metadata merupakan kunci utama agar sarana temu kembali dapat berfungsi optimal. Metadata berfungsi sebagai “label digital” yang memberikan konteks pada sebuah arsip. Tanpa metadata yang seragam, aplikasi secanggih apa pun tidak akan mampu menyajikan informasi yang akurat.

Di Desa Cikeruh, perlu diterapkan standar penamaan yang mencakup elemen-elemen penting seperti: (1) Kode Klasifikasi sesuai TND, (2) Tanggal Dokumen, (3) Perihal Singkat, dan (4) Nomor Urut. Misalnya, sebuah Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa harus memiliki format penamaan file yang identik di setiap komputer unit kerja. Dengan adanya standarisasi ini, risiko terjadinya “data silau” atau tumpang tindih informasi dapat diminimalkan. Lebih jauh lagi, standarisasi ini memudahkan proses migrasi data di masa depan jika terjadi pembaruan sistem perangkat lunak, sehingga data tetap kompatibel dan dapat dibaca oleh sistem yang baru.

Tantangan Budaya Kerja dalam Transformasi Kearsipan Digital

Perubahan dari sistem manual ke digital di Desa Cikeruh bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah budaya kerja. Aparatur desa yang sudah terbiasa dengan metode konvensional cenderung mengalami technostress ketika dihadapkan pada aplikasi seperti SRIKANDI. Ada kekhawatiran bahwa sistem digital akan menambah beban kerja atau bahkan menghilangkan kontrol mereka atas dokumen yang mereka kelola. Oleh karena itu, strategi manajemen perubahan mutlak diperlukan. Sosialisasi tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi harus mampu mengubah pola pikir (mindset) bahwa kearsipan digital adalah alat bantu yang mempermudah kerja, bukan beban tambahan. Penguatan literasi digital harus dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu hari yang bersifat seremonial.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat perbedaan signifikan dalam efisiensi operasional. Pada sistem manual di Desa Cikeruh, ketergantungan pada ingatan individu (tacit knowledge) sangat tinggi. Jika petugas yang bersangkutan berhalangan hadir, maka proses pelayanan publik terhenti karena arsip sulit ditemukan. Sebaliknya, dengan implementasi sistem digital, pengetahuan tersebut menjadi milik organisasi (explicit knowledge) yang dapat diakses oleh siapa pun yang memiliki kewenangan.

Strategi Transformasi dan Mitigasi Risiko Digitalisasi di Desa Cikeruh

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan, Desa Cikeruh memerlukan peta jalan (roadmap) transformasi digital yang komprehensif.

1. Langkah pertama adalah penguatan aspek regulasi internal desa. Meskipun regulasi nasional sudah tersedia, Desa Cikeruh perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) lokal yang mengatur siapa yang bertanggung jawab melakukan pemindaian dokumen dan bagaimana struktur penamaan file digital dilakukan secara seragam di seluruh unit kerja (Kaur dan Kasi).
2. Kedua, aspek infrastruktur harus menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Digitalisasi tidak akan berjalan tanpa adanya perangkat keras pemindai berkecepatan tinggi dan server penyimpanan yang aman. Pemanfaatan teknologi berbasis cloud dapat menjadi solusi jangka pendek sebelum Desa Cikeruh sepenuhnya terintegrasi dengan sistem SRIKANDI nasional. Hal ini memungkinkan arsip dapat diakses secara remote (jarak jauh) oleh perangkat desa yang berwenang, sehingga efisiensi kerja meningkat secara signifikan.
3. Ketiga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Literasi digital aparatur desa di Cikeruh

Tabel 1. Perbandingan Efisiensi Sistem Temu Kembali.

Aspek Perbandingan	Sistem Manual	Sistem Digital
Waktu Pencarian	15 - 30 Menit (Tergantung memori petugas)	< 1 menit (Pencarian kata kunci)
Keamanan Data	Risiko rusak (rayap/lembab) & hilang	Cadangan otomatis di Cloud/Server
Aksesibilitas	Harus datang ke gudang arsip fisik	Dapat diakses melalui PC/Smartphone
Ketetapan	Sering terjadi salah letak berkas	Terindeks berdasarkan kode klasifikasi

harus ditingkatkan agar mereka tidak hanya mampu mengoperasikan komputer, tetapi juga memahami esensi kearsipan seperti retensi arsip dan klasifikasi keamanan data. Dengan mengombinasikan kesiapan teknologi, regulasi yang kuat, dan SDM yang kompeten, sarana temu kembali arsip di Desa Cikeruh tidak lagi menjadi hambatan, melainkan menjadi aset strategis dalam pelayanan publik yang modern.

Di samping manfaat efisiensi yang telah dipaparkan, sarana temu kembali arsip juga harus dipandang dari sudut pandang keamanan informasi.

Analisis Risiko dan Mitigasi Kehilangan Informasi

Keberadaan sarana temu kembali arsip tidak hanya berfungsi untuk kecepatan layanan, tetapi juga sebagai strategi pertahanan terhadap risiko kehilangan informasi permanen. Di Desa Cikeruh, ketergantungan pada satu salinan fisik tanpa adanya penggandaan digital menciptakan risiko tinggi terhadap bencana tak terduga seperti kebakaran, banjir, atau kerusakan akibat faktor biologis (hama dan kelembapan). Tanpa sistem temu kembali yang terintegrasi, proses rekonstruksi data pasca-bencana akan menjadi mustahil dilakukan.

Risiko lain yang sering terabaikan adalah "amnesia organisasi", di mana informasi penting hilang karena pejabat atau perangkat desa yang mengelola arsip tersebut purna tugas atau pindah unit kerja. Dengan menerapkan sistem temu kembali digital, risiko ini dimitigasi melalui digitalisasi metadata yang permanen. Setiap dokumen yang masuk ke dalam sistem akan memiliki jejak audit yang jelas, sehingga meskipun terjadi pergantian personel, kesinambungan informasi di Pemerintah Desa Cikeruh tetap terjaga. Mitigasi ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga memori kolektif desa dan menjamin hak akses informasi bagi generasi mendatang.

Menelaah seluruh temuan penelitian ini, terlihat jelas bahwa pembenahan sarana temu kembali arsip bukan sekadar masalah teknis kearsipan, melainkan sebuah kebutuhan strategis organisasi. Sebagai bagian akhir dari diskusi ini, perlu dirumuskan apa saja dampak atau implikasi dari hasil penelitian ini terhadap kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah desa.

Setelah memahami risiko fisik dan teknis dalam pengelolaan arsip, dimensi lain yang tidak kalah krusial untuk dibahas adalah mengenai hak akses dan perlindungan data. Hal ini menjadi relevan mengingat Desa Cikeruh mengelola banyak data personal warga yang bersifat sensitif.

Sistem Keamanan dan Hak Akses dalam Temu Kembali Arsip

Keberhasilan sebuah sistem temu kembali arsip tidak hanya diukur dari seberapa cepat informasi ditemukan, tetapi juga seberapa aman informasi tersebut dari akses pihak yang tidak berwenang. Di Pemerintah Desa Cikeruh, standarisasi mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk meminjam, melihat, dan menggandakan arsip harus diatur secara ketat dalam Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD). Tanpa pengaturan akses yang jelas, keberadaan sistem digital justru dapat menjadi bumerang yang mengancam privasi penduduk.

Pengaturan hak akses ini harus mencakup klasifikasi arsip berdasarkan tingkat kerahasiaannya, yaitu arsip terbuka, arsip terbatas, arsip tertutup, dan arsip sangat rahasia. Sebagai contoh, arsip mengenai perencanaan pembangunan desa (RKPDDes) dapat dikategorikan sebagai arsip terbuka yang mudah diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi. Namun, arsip mengenai data kependudukan spesifik atau catatan bantuan sosial harus memiliki batasan akses yang hanya bisa dibuka oleh kepala urusan terkait. Dengan menerapkan sistem kendali akses yang berbasis User-ID dan kata sandi pada aplikasi digital, Desa Cikeruh dapat menjamin bahwa hanya personel tertentu yang dapat melakukan proses temu kembali terhadap data sensitif. Hal ini merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Implikasi Manajerial dan Kebijakan bagi Pemerintah Desa Cikeruh

Hasil penelitian ini membawa implikasi serius terhadap bagaimana Pemerintah Desa Cikeruh mengalokasikan sumber dayanya. Transformasi kearsipan tidak boleh hanya dipandang sebagai pengadaan barang dan jasa berupa komputer atau pemindai, melainkan

harus masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pihak pemerintah desa perlu mempertimbangkan adanya insentif atau penghargaan bagi unit kerja yang mampu menjaga ketertiban arsipnya.

Selain itu, hasil penelitian ini mendorong adanya sinergi antara Sekretariat Desa dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengadakan pendampingan teknis secara berkala. Tanpa adanya kebijakan yang mengikat di level desa, seperti Peraturan Desa (Perkades) tentang Tata Kelola Kearsipan, maka upaya digitalisasi ini hanya akan bersifat sementara dan rentan kembali ke pola manual saat terjadi pergantian kepemimpinan atau personel. Oleh karena itu, penguatan regulasi lokal menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan sistem temu kembali arsip yang efektif di Desa Cikeruh.

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang juga hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, pengelolaan arsip yang baik menjadi suatu keharusan dan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan transparansi terhadap publik oleh seluruh instansi pemerintah, salah satunya adalah pemerintah desa. Dengan mengambil topik tentang salah satu aspek pengelolaan arsip, yaitu sistem temu kembali arsip, dijelaskan bahwa sistem temu kembali arsip didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara tersistem atau sistematis baik itu secara manual atau pun berbantuan teknologi informasi untuk mengetahui sumber lokasi suatu dokumen, subjek, atau informasi. Sistem temu kembali arsip juga memiliki peran yang penting untuk mendukung sistem pengelolaan arsip. Namun, sistem temu kembali arsip dalam pemerintah desa masih memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah kurang optimalnya penataan arsip administrasi desa.

Pengelolaan arsip administrasi desa di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang juga masih memiliki permasalahan yang sama. Sebagai salah satu desa yang memiliki aktivitas administrasi yang tinggi, penataan arsip administrasi desa belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga jika arsip administrasi desa dibutuhkan, terdapat beberapa masalah seperti rusak dikarenakan tidak ada pemeliharaan yang baik ataupun sulit

dicari karena sistem pemberkasan yang tidak sesuai dengan kaidah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di bidang kearsipan yang dapat mengelola arsipnya dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menyimpan dokumen arsip, serta penggunaan aplikasi digital untuk pengelolaan arsip belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, proses pencarian dan pengelolaan arsip menjadi kurang akurat, tidak maksimal, dan berpotensi menghambat pelayanan publik dan pertanggungjawaban administrasi desa.

Mengatasi permasalahan tersebut, penerapan sistem digital seperti mulai menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan SRIKANDI merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem pengarsipan. Selain itu, penyusunan inventaris arsip sebagai *finding aids*, penerapan jadwal retensi arsip (JRA), serta peningkatan kapasitas SDM di bidang kearsipan juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, penguatan sistem kearsipan di Desa Cikeruh dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan tertib administrasi.

Penerapan strategi di atas tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal desa tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kasman et al. (2025) menegaskan bahwa melalui Perkades dan kolaborasi SDM, Desa Cikeruh dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam GNSTA. Akib & Sapruni (2023) serta Hamsinah et al. (2024) mendukung bahwa pelatihan dan integrasi aplikasi digital seperti Srikandi akan mengubah tantangan menjadi peluang untuk pelayanan publik yang prima. Zuliyanti (2021) dan Sutikno (2025) semakin memperkuat bahwa pendekatan bertahap dari manual ke digital terbukti berhasil di berbagai konteks pemerintahan daerah. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah segera menyusun roadmap implementasi 3-5 tahun yang mencakup pelatihan tahunan, pengadaan infrastruktur sederhana, dan monitoring rutin terhadap efektivitas temu kembali arsip. Dengan demikian, Desa Cikeruh tidak hanya memenuhi kewajiban hukum sesuai UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tetapi juga menjadi pionir dalam penerapan kearsipan digital di tingkat desa yang mendukung visi

pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kesimpulan ini menegaskan bahwa transformasi digital kearsipan di Desa Cikeruh bukanlah pilihan melainkan kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari referensi yang dikaji, Desa Cikeruh dapat mencapai standar pengelolaan arsip yang setara dengan instansi pemerintahan yang lebih maju. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya pada pelayanan publik tetapi juga pada akuntabilitas dan transparansi secara keseluruhan. Rekomendasi tambahan mencakup pembentukan tim kearsipan desa khusus, alokasi anggaran tahunan untuk pemeliharaan sistem, serta kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran untuk program pengabdian masyarakat berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, Desa Cikeruh diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. (2024). SRIKANDI - *Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi*. <https://sikd.anri.go.id/>
- Akib, K., & Sapruni, S. (2023). *Pengelolaan arsip pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan publik*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.2), 1981–1986. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/733>
- Hamsinah, H., Juairiah, J., & Asmawardah, A. (2024). *Mekanisme sistem temu kembali arsip (studi deskriptif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan)*. *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 12(2), 149–163. <https://doi.org/10.18592/pk.v12i2.13035>
- Kasman, A., Destrian, O., Herdiansah, A. G., Sudarma, S., & Rayhani, F. S. (2025). *Implementasi kebijakan pengelolaan arsip pemerintahan desa dalam gerakan nasional sadar tertib arsip di desa Cikeruh*. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 8(4), 640–652. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/67048>
- Sutikno, A. (2025). *Sistem informasi kearsipan dinamis berbasis web di lingkungan pemerintah desa Sukaresik*. *Jurnal Publikasi Ilmu Komputer dan Multimedia*, 4(2), 64–74. <https://doi.org/10.55606/jupikom.v4i2.4013>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>
- Zuliyanti, F. (2021). *Pengolahan arsip dinamis inaktif sebagai upaya efektivitas dan efisiensi temu kembali arsip di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul*. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 1(3). <https://doi.org/10.24198/inf.v1i3.35257>